

KELOMPOK 17

Reviewer  
Lokasi

Drs. Aris Doyan, M.Si., Ph.D  
Ruang Sidang LPPM

No	Ketua Peneliti	Anggota	Judul Penelitian	Fakultas/ Program	Tanda Tangan
1	Lubis, SH., M.Hum	Idi Amin, SH., MH Lalu Saipudin, SH., MH	Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba di Polres Kota Bima	HUKUM	1
2	Nanda Ivan Natsir, SH., MH	Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum Syamsul Hidayat, SH., MH	Kebijakan aplikatif tindak pidana perdagangan orang (Trafficking)	HUKUM	2
3	Abdul Hamid, SH., MH	Dr. H. L. Parman, SH., M.Hum Syamsul Hidayat, SH., MH	Faktor-faktor yang mempengaruhi yang terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi di wilayah hukum Polres Lombok Utara)	HUKUM	3
4	Laely Wulandari, SH., MH	Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH Lalu Saipudin, SH., MH	Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang	HUKUM	4
5	H. Sofwan, SH., M.Hum	Prof. Dr. Gatot Dwi H.W., SH., M.Hum Dr. Chrisdianto Eko P., SH., MH Dr. M. Risnain, SH., MH	Ratio legis ketentuan persyaratan pengangkatan perangkat desa dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa	HUKUM	5
6	Dr. M. Risnain, SH., MH	H. Sofwan, SH., M.Hum Dr. Chrisdianto Eko P., SH., MH	Model Pengawasan perilaku hakim mahkamah konstitusi	HUKUM	6
7	Rusnan, SH., MH	Prof. Dr., M.H. Galang Asmara, SH., M.Hum Dr. Minolla, SH., MH Johannes Johny Koynja, SH., MH	Tinjauan yuridis utang pajak dalam System Self Assessment	HUKUM	7
8	Prof. Dr., M.H. Galang Asmara, SH., M.Hum	Rusnan, SH., MH Johannes Johny Koynja, SH., MH Erlis Septiani Nurbani, SH., LLM	Kajian Yuridis penerapan penangihan pajak dengan surat paksa dan pemblokiran rekening kaitannya terhadap penerimaan pajak	HUKUM	8
9	Dr. Zunnuraini, SH., MH	H. A. Khair, SH., MH Kafrawi, SH., M.Si M. Saleh, SH., MH Sarkawi, SH., MH	Pelestarian lingkungan laut melalui pengelolaan wilayah pesisir oleh pemerintahan daerah	HUKUM	9
10	Kafrawi, SH., M.Si	Dr. Zunnuraini, SH., MH H. A. Khair, SH., MH M. Saleh, SH., MH Sarkawi, SH., MH	Pemanfaatan potensi wisata Gunung Tambora dalam rangka peningkatan APB desa di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu	HUKUM	10
11	AD. Basniwati, SH., MH	Dr. Rr. Cahyowati, SH., MH Sunarjo Edy Siswanto, SH., MH Haeruman Jayadi, SH., MH	Politik hukum perubahan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	HUKUM	11
12	Haeruman Jayadi, SH., MH	Dr. H. Kaharudin, SH., MH Sunarjo Edy Siswanto, SH., MH AD. Basniwati, SH., MH	dualisme kedudukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara independen	HUKUM	12
13	Dr. H. L. Sabardi, SH., MS	H. Supardan Mansyur, SH., MH Drs. H. Usman, M.Si	Lembaga pencegah konflik dalam kearifan lokal masyarakat sasak di Pulau Lombok	HUKUM	13

14	H. Israfil, SH., M.Hum	Muzakir Salat, SH., MH Ita Suraya, SH., MH	Analisis yuridis bagian ahli waris dzawil furudh menurut hukum islam dan bagian ahli waris legitime portie menurut hukum perdata	HUKUM	14
15	Fatahullah, SH., MH	Sugiyarno, SH., MH Haeratul, SH., MH	Analisis terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia	HUKUM	15
16	Sri Hariati, SH., MH	Sugiyarno, SH., MH Dr. Anang Husni, SH., M.Hum	Dinamika transisi komunitas wetu telu dalam keyakinan pelaksanaan syari'at islam di Dusun Sangiang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur	HUKUM	16
17	Hj. Mualifah, SH., MH	H. Lalu Syapruddin, SH., M.Hum Muhammad Faisal, SH., MH	Eksistensi undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial	HUKUM	17
18	Ridwan, SH., MH	Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum M. Khotibul Islam, SH., M.Hum	Analisis penggunaan hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebagai alat bukti dalam proses persidangan	HUKUM	18
19	Muhammad Jailani, SH., MH	M. Zainuddin, SH., MH Hj. Rina Khairani, SH., LLM	Tanggung jawab negara dalam memberi jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	HUKUM	19
20	H. Lalu Adnan, SH., M.Hum	Dewi Sartika, SH., MH Fatahullah, SH., MH	Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana (Suatu analisis terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak)	HUKUM	20
21	Lewis Grindulu, SH., MH	Muhammad Jailani, SH., MH M. Zainuddin, SH., MH	Pelanggaran disiplin militer dalam kaitannya dengan peraturan panglima TNI nomor 11/VII/2007 (Suatu tinjauan atas anggota militer yang melakukan pernikahan siri di Pulau Lombok)	HUKUM	21
22	Arief rahman, SH., M.Hum	Dr. Sahnan, SH., M.Hum Wiwiek Wahyuningsih, SH., M.Kn	Kekuatan mengikat akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah di bawah tangan atas keberadaan tanah orang lain pada sertifikatnya (Studi di Kabupaten Sumbawa)	HUKUM	22